

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Studi ini berfokus pada hubungan antara pemerintah Indonesia dan Australia, program kerja sama ekonomi. Bentuk kerjasama ini membawa keuntungan timbal balik antara satu negara dengan negara lainnya. Kerja sama ini bisa bersifat bilateral atau multilateral. Setiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, dengan bekerja sama, negara-negara dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing dan menyembunyikan kekurangannya sehingga, pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar dan potensi yang dimiliki negara dapat dimanfaatkan. Negara-negara di dunia tidak dapat berjalan dengan sendirinya karena adanya saling ketergantungan. Negara-negara hendaknya menjalin kerjasama dengan negara lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Tidak setiap negara memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang memadai. Adanya saling ketergantungan memerlukan kerja sama internasional dari masing-masing negara. Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mempercepat pembangunan ekonomi (Amarullah Juni, 2021).

Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang sangat penting dan kompleks di banyak bidang, termasuk ekonomi, politik, masalah sosial, kesehatan, dan keamanan. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia terjalin pada tahun 1949. Indonesia menjalin hubungan diplomatik pertama kali pada tanggal 17 Maret 1950, ketika menunjuk Dr. Oesman Sastromidjojo sebagai Perdana Menteri Sementara, sekaligus mengunjungi Arsip Nasional di Canberra. Sejak tahun 1945 hingga 1995, hubungan Indonesia dan Australia secara konsisten membuahkan hasil yang menarik.

Pada awalnya hubungan kedua negara sangat baik, terutama ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Namun hubungan Indonesia dan Australia masih tegang. Hubungan kedua negara sangatlah unik di satu sisi terdapat banyak peluang untuk berkolaborasi, namun di sisi lain terdapat banyak tantangan. Namun, kedua negara sering disamakan dengan *roller coaster*, yang mula-mula naik perlahan namun kemudian turun drastis, menjadi simbol saling ketergantungan kedua negara. Situasi ini muncul akibat berbagai perbedaan, antara lain terkait perekonomian, laju pertumbuhan, dan orientasi politik yang menghambat penyelarasan prioritas. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan banyak masalah yang memperburuk hubungan bilateral (Ansori, 2015).

Meskipun mereka telah bekerja sama dalam beberapa isu internasional, namun beberapa masalah dapat muncul dalam kerja sama seperti masalah keamanan maritim, salah satu permasalahan terbesarnya adalah sengketa batas laut di Laut Arafura, Laut Timor, dan Laut Bali. Topik ini menyangkut sengketa batas laut, penangkapan ikan ilegal yang dilakukan nelayan Australia di perairan Indonesia dan perlindungan batas laut. Kemudian bisnis dan Investasi, meskipun Indonesia dan Australia merupakan mitra dagang yang penting, masih terdapat hambatan dalam perdagangan bilateral. Perbedaan kebijakan bea cukai, peraturan investasi dan hambatan non-tarif dapat mempengaruhi hubungan ekonomi. Permasalahan yang selanjutnya yaitu, isu yang berkaitan dengan lingkungan, Australia dan Indonesia memiliki kepentingan lingkungan yang sama, khususnya di bidang perlindungan hutan hujan dan mitigasi perubahan iklim. Namun, terkadang mereka mengambil pendekatan berbeda untuk menangani permasalahan lingkungan tersebut. Masalah keamanan dan terorisme, Terorisme dan radikalisme terus menjadi ancaman di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Australia dan Indonesia telah bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, namun perbedaan pendekatan keamanan masih tetap ada. Meskipun hubungan antara

Indonesia dan Australia dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, keduanya juga memiliki banyak kesamaan kepentingan, seperti perdagangan, keamanan regional, dan upaya melawan perubahan iklim. Itu sebabnya penting untuk terus berupaya mengatasi perbedaan dan bekerja sama mencari solusi yang saling menguntungkan (Marisa, 2020).

Kondisi hubungan bilateral Indonesia-Australia ini telah mengalami pasang surut selama bertahun-tahun, dengan beberapa kontroversi dan konflik yang terjadi di masa lalu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan tersebut telah membaik, terutama setelah perjanjian bilateral Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Australia (IA-CEPA) yang disahkan pada 5 Juli 2020, bertujuan untuk mendukung kepentingan bersama antara Indonesia dan Australia dalam upaya mewujudkan wilayah yang aman dan sejahtera. IA-CEPA juga mendorong pertukaran keterampilan, meningkatkan hubungan bilateral, dan menciptakan pasar dan peluang baru bagi dunia usaha dan para produsen utama. Selain itu, IA-CEPA membentuk Program Kerjasama Ekonomi (IA-CEPA ECP). Program ini membantu pemerintah Indonesia dan Australia dalam menjalankan perjanjian ini dan membantu bisnis di kedua negara memanfaatkan berbagai peluang untuk pertumbuhan dan pembangunan yang saling menguntungkan

Dalam hal strategi pertumbuhan ekonomi global, Indonesia dan Australia berada dalam posisi yang kuat untuk meluncurkan inisiatif-inisiatif baru dan lebih luas. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki peluang tinggi dengan layanan dan keterampilan kelas dunia, sementara Australia merupakan negara maju yang berpendapatan tinggi dengan layanan dan keterampilan kelas dunia. Menteri Perdagangan dan Perekonomian Australia yang menekankan komitmen Australia untuk mendorong optimalisasi peluang IA-CEPA dalam peningkatan kualitas kemitraan

antara kedua negara. Ini adalah program pertama di bidang promosi perdagangan bilateral, dan ini menandakan komitmen Australia untuk memaksimalkan efisiensi.

Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), program kerja sama ekonomi bilateral yang didukung pemerintah yang dikenal sebagai IA-CEPA ECP dirancang untuk mendorong perdagangan dan investasi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif antara Indonesia dan Australia. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat IA-CEPA bagi kedua negara dalam tiga cara yaitu, meningkatkan akses pasar, meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah, dan meningkatkan peluang perdagangan dan investasi. Katalis terhubung dan bermitra dengan bisnis di kedua negara di seluruh rantai nilai komersial untuk mengidentifikasi dan mengembangkan peluang. Katalis dapat mengeksplorasi kelayakan dan profitabilitas serta membantu kemajuan perjanjian komersial. Katalis bekerja dengan bisnis dan pemerintah untuk menerapkan IA-CEPA dan sepenuhnya menyadari kekayaan peluang perdagangan dan investasi pelengkap yang tersedia. Katalis melengkapi kegiatan pembangunan Australia yang ada, membawa pendekatan yang berorientasi komersial, bilateral, dan gender serta inklusif secara sosial untuk semua yang kami lakukan

Katalis juga berkontribusi pada tujuan peningkatan investasi perdagangan bilateral. Upaya dalam memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia-Australia ini terdapat beberapa alasan yaitu pada pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari kedua negara tersebut. Untuk memperkuat dan memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing negara dapat mencapai pertumbuhan yang lebih baik, kemudian perluasan pasar, bentuk kerja sama ekonomi yang memungkinkan kedua negara ini dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan akses produk dan layanan baru. Investasi asing membentuk kerja sama

ekonomi agar dapat menarik lebih banyak investasi yang stabil dan mengurangi hambatan investasi, negara-negara dapat menarik investasi dari luar negeri (Siaran Pers, 2021).

Alasan peneliti membahas isu tentang kerja sama bilateral Indonesi-Australia dalam IA-CEPA ECP ini berbeda dengan pembahasan yang lain, seperti disebutkan sebelumnya, penelitian ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Australia yang melaksanakan inisiatif katalis. Dalam katalisnya, menyajikan ke satu penjuror pembahasan, namun penulis akan membahas salah satu. Katalis diharapkan dapat mengurangi biaya akses pasar, meningkatkan integritas pasar, dan memberikan lebih banyak kemampuan, khususnya di bidang manufaktur dan sektor jasa. Selain itu penulis juga ingin menyampaikan uraian pesan yang telah disampaikan para menteri tentang katalis bahwa akan mendorong semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, pihak swasta dan akademisi, untuk memanfaatkan peluang berharga yang disediakan katalis berupa nasihat terpercaya, jaringan lokal, wawasan pasar, dan pengembangan kemampuan bagi setiap pemangku kepentingan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi IA-CEPA ECP dalam meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia-Australia?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Indonesia Dan Australia Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui IA-CEPA ECP Pada Tahun 2020-2021 (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, Economic Cooperation Program)” adalah sebagai berikut:

1. Dapat menganalisis strategi yang terkandung dalam IA-CEPA ECP yang relevan dengan konteks perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Australia
2. Efektivitas dan keberhasilan implementasi strategi IA-CEPA ECP dalam mencapai tujuan kerjasama ekonomi bilateral

#### **D. Landasan Konseptual/Kerangka Teori**

##### **1. Kepentingan Nasional**

Peneliti akan menggunakan salah satu konsep yaitu kepentingan nasional untuk melihat kepentingan negara dalam kerja sama internasional yang bersifat bilateral. Keunggulan nasional merupakan konsep yang paling umum digunakan dalam analisis hubungan internasional, baik untuk menulis, menjelaskan, menganalisis, atau menuntut transaksi internasional. Prinsip Kekuatan Nasional menyatakan bahwa untuk mencapai kekuatan nasional suatu negara harus mengurangi kebutuhan negara lain. Jika kemampuan nasional bangsa terpenuhi, maka negara akan maju secara mantap, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Penguatan Nasional merupakan tujuan jangka panjang dan merupakan faktor penting yang memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan dalam politik luar negeri (Morgenthau, 1952).

Konsep manfaat nasional merupakan tugas yang dapat mengidentifikasi faktor yang dapat digunakan untuk menciptakan rasa urgensi saat membahas kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional adalah sebuah konsep yang umum, namun hal ini juga merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara, karena hal ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan negara, serta kemampuan mereka untuk bekerja dan hidup bersama, serta kemampuan mereka untuk melindungi kepentingan mereka. lingkungan hidup dan perekonomian mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa politik luar negeri merupakan permasalahan dalam kehidupan

seseorang, baik itu permasalahan kesehatan, perekonomian, maupun politiknya. Masalah-masalah ini dapat menjadi politik luar negeri jika penyelesaiannya memerlukan suatu dimensi luar negeri, jika kekuatan nasional negara-bangsa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya. Demikian pula, jika permasalahan yang disebutkan di atas dapat diselesaikan oleh politisi nasional (Purnama Putera, 2017).

Kepentingan tanah air berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam melindungi warganya dari ancaman internal maupun eksternal. Pentingnya perekonomian berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam membantu meningkatkan perekonomiannya. Dengan demikian, kajian ini dapat dipahami dengan menganalisis strategi Keamanan nasional. Faktor perekonomian dalam setiap kebijakan suatu negara senantiasa diupayakan untuk meningkatkan kinerja perekonomian negara tersebut. Salah satu manfaat nasional di bidang perekonomian adalah meningkatkan jumlah orang yang bekerja sama untuk menumbuhkan perekonomian suatu negara dengan memperluas sektor manufaktur dan sektor lainnya. Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, pekerjaan yang dilakukan di negara lain tidak dapat dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan di negara lain. Proses dinamis yang terjadi sepanjang perkembangan kebijakan luar negeri suatu negara, yang pada akhirnya berdampak pada implementasi kebijakan yang tepat. Suatu negara yang dapat menghasilkan kebijakan yang berkaitan dengan suatu kasus yang mempengaruhi keputusannya (Liling, 2020).

Pada konsep ini, pentingnya kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh politik dalam negeri dan hubungan internasional, dinamika kebijakan internasional membuat suatu negara sulit menetapkan norma dan kebijakan guna menjaga eksistensi dan kedudukan negara dalam sistem internasional. Dalam keinginan

untuk mengambil kebijakan luar negeri juga terhambat oleh perubahan di tingkat domestik dan internasional. Perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi skenario politik dalam negeri terutama pemimpin (presiden/pemimpin negara) sebagai unsur penting dalam penyusunan kebijakan luar negeri. Namun, persepsi individu mengenai struktur politik dunia tidak dapat diabaikan (Maksum, 2015).

## 2. Teori Interdependensi Kompleks

Teori ini dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye dalam bukunya *“Power and Interdependence”* pada tahun 1977. Teori interdependensi dapat diartikan sebagai timbal balik hubungan atau hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam hubungan internasional. Menurut teori saling ketergantungan, seseorang tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, karena memerlukan bantuan orang lain. Saling ketergantungan telah berkembang hingga kolaborasi antar aktor profesional telah ada sejak awal. Peningkatan saling ketergantungan yang terjadi antarnegara akan membuat potensi negara-negara tersebut terlibat dalam senjata konflik. Menurut para pendukung saling ketergantungan liberal, modernisasi adalah sebuah proses yang meningkatkan tingkat dan besarnya keuntungan bersama, sehingga menghasilkan kerja sama yang lebih luas.

Saling ketergantungan merupakan manfaat terpenting yang memungkinkan suatu negara meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan komparatif. Pencapaian tersebut dimungkinkan berkat upaya Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye (Keohane & Nye, 1977). Saling ketergantungan tersebut dapat terjadi dalam berbagai isu, termasuk ekonomi dan politik. Tentang masalah ekonomi seperti perdagangan dan investasi. Jika dibandingkan dengan transaksi antar pemerintah yang berbasis informasi, transaksi komersial memiliki dampak saling ketergantungan yang lebih besar. Saling ketergantungan di sektor ini akan



meningkatkan risiko jika diabaikan. Di sektor investasi, risiko perubahan bagi pelaku saling ketergantungan semakin meningkat akibat adanya pergeseran kebijakan investasi.

Dalam kerangka ini, upaya Indonesia dan Australia untuk memperkuat kerjasama ekonomi dapat dipahami sebagai langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat ketergantungan ekonomi positif antara kedua negara. Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang saling terkait dalam bidang ekonomi. Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, sementara Australia memiliki teknologi maju dan keahlian di beberapa sektor ekonomi. Pengaplikasian teori interdependensi kompleks terhadap kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam IA-CEPA ECP (Economic Cooperation Program) sebagai katalis dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan ekonomi antara kedua negara. Teori interdependensi kompleks mengasumsikan bahwa kerjasama internasional tidak hanya terjadi dalam satu dimensi, tetapi melibatkan jaringan hubungan yang kompleks di berbagai sektor. Berikut adalah cara mengaplikasikan teori interdependensi kompleks dalam konteks (Rosina et al., 2018).

## **E. Hipotesa**

Hipotesis penelitian ini adalah:

- Implementasi IA-CEPA ECP secara signifikan meningkatkan akses pasar untuk barang dan jasa Indonesia di Australia, dan sebaliknya.
- IA-CEPA ECP membuka peluang bagi pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia dan Australia melalui peningkatan akses pasar dan kolaborasi bisnis.

Katalis adalah salah satu inisiatif penting yang dapat digunakan sebagai wadah untuk mengimplementasikan upaya-upaya ini dalam memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Kerjasama ekonomi antara kedua negara tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi tetapi juga dapat memperdalam hubungan bilateral mereka secara keseluruhan.

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan metode kualitatif.

Marshall dan Rossman: Dalam buku "Designing Qualitative Research," yang menyatakan bahwa metode kualitatif adalah "sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data yang mendalam dari peserta dalam pengaturan alamiah dengan menggunakan data sekunder berupa jurnal, laporan penelitian, berita dan artikel yang terkait dengan hubungan Indonesia-Australia untuk memperkuat kerja sama ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kebijakan luar negeri, perubahan politik di kedua negara, serta kepentingan strategis dan ekonomi mempengaruhi hubungan bilateral. (Marshall & Rossman, 2014).

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan, sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bagian yang saling berhubungan, antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, sehingga penulis mengambil tema dan judul seperti yang ada di sampul. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, landasan konseptual, metode penelitian, hipotesa, dan sistematika kepenulisan.

### **BAB II STRATEGI IA-CEPA ECP**

Pada BAB II ini akan menjelaskan tentang bagaimana langkah dan rencana IA-CEPA ECP dalam memingkatkan perekonomian antara Indonesia dan Australia

### **BAB III IMPLEMENTASI IA-CEPA ECP DALAM MENINGKATKAN KERJA SAMA EKONOMI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Pada BAB III ini akan lebih banyak membahas tentang implementasi IA-CEPA ECP dalam meningkatkan kerja sama ekonomi, kemudian apa saja tujuan khusus Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) dalam Program Kerja Sama Ekonomi (ECP) dan juga bagaimana ECP akan mendorong kegiatan multi-tahun yang berkaitan dengan tiga hasil utama di tiga sektor ekonomi yang luas.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas keseluruhan penelitian dan sebagai jawaban dari rumusan masalah dengan temuan yang diperoleh dalam pembahasan” Strategi Pemerintah Indonesia dan Australia Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui IA-CEPA ECP Pada Tahun 2020-2021”